

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ILLEGAL FISHING* YANG TERJADI DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2010-2013)

OLEH:

WILIATER PRATOMO R.S

B 111 09 133

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ILLEGAL FISHING*
YANG TERJADI DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Tahun 2010-2013)**

OLEH :

WILIATER PRATOMO R.S

B 111 09 133

SKRIPSI

**Diajukan sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ILLEGAL FISHING* YANG TERJADI DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2010-2013)

Disusun dan diajukan oleh

WILIATER PRATOMO R.S

B 111 09 133

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat 28 Februari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

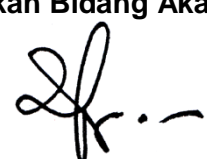
Ketua


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 2006004 1 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

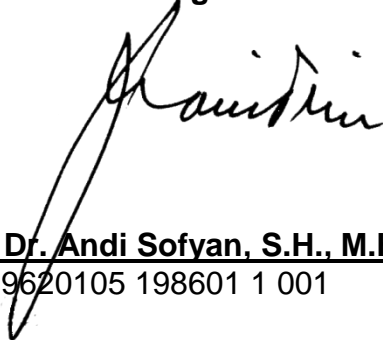
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WILIATER PRATOMO R.S
Nomor Induk : B111 09 133
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *ILLEGAL FISHING* YANG TERJADI DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Tahun 2010 – 2013)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

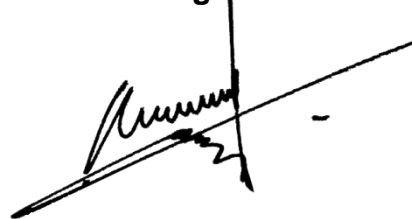
Makassar, Januari 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP.19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP.19800710 2006004 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Wiliater Pratomo R.S

Nomor Pokok : B 111 09 133

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Kriminologis terhadap *Illegal Fishing* yang
Terjadi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-
2013)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Januari 2014

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Wiliater Pratomo R.S (B111 09133), *Tinjauan Kriminologis terhadap Illegal Fishing yang Terjadi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2013)* dibimbing oleh Andi Sofyan sebagai Pembimbing I, dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Direktorat Polair Polda Sulselbar dalam menanggulangi terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi terkait dengan perkara ini yakni penelitian dilaksanakan di Direktorat Polair Polda Sulselbar dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan *illegal fishing* yang merupakan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *Illegal fishing* adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*. Untuk upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal fishing* ditempuh melalui tindakan Upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum mengadakan patroli secara rutin bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dan juga melalui upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus untuk semua yang kau berikan, terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaanmu padaku, karena atas berkat-Nya lah sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Skripsi berjudul **“Tinjauan Kriminologis terhadap *illegal fishing* yg terjadi di kota Makassar (Studi Kasus 2010-2013)”** disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berbagai pihak telah membantu dan mendukung Penulis selama menempuh pendidikan sampai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga sepatutnya bila penulis mengucapkan terima kasih.

Secara khusus Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Ir. Simon Payung dan Ibunda tercinta Maria Banneala atas jerih payah, kesabaran, kasih sayang dan didikan dalam membesarkan Penulis dan yang banyak berkorban baik materil maupun non materil serta doa yang tanpa henti-hentinya mereka panjatkan mulai dari Penulis dilahirkan sampai mendapatkan keberhasilan ini.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis juga sampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., MH., selaku dosen pembimbing I, dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, yang berkenan memberikan waktu luang serta demi membimbing Penulis ditengah kesibukan beliau. Atas bimbingan, saran, ilmu yang sangat berharga, serta kesabaran dalam proses bimbingan dari

beliau sekalian. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.

Dalam penulisan ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi KRS.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam pengurusan berkas ujian skripsi.
6. Seluruh pihak yang membantu Penulis dalam penelitian di Direktorat polda polair sulselbar.
7. Saudara-saudaraku Marselinus Payung Dwi Putra, Febriano Rezky Imanuel Simon Putra.

8. Rosiani Tulak, S.E. untuk waktu dan kebersamaannya selama ini dan atas kasih sayang, perhatian, dan kesabarannya dalam menghadapi Penulis selama ini.
9. Para sahabatku yang tergabung dalam tim sepakbola dan futsal PAMATOR FH-UH Kris Demirto Faot, S.H, Muslimin Lagalung, S.H Ikbai, S.H., Arsel Mangontan, S.H., Khalil Muslim, S.H., Wahyu Rasyid, S.H., Rudyanto, S.H. Raiman, S.H., Antonius Sanda, S.H. Dedi Risfandi, S.H., Alfrianti Alimuddin, S.H., Suandri Unca Sinda, S.H., Nemos Muhadar, S.H., Avelin Pingkan Komuna, S.H., Suhaeni Rosa., Resky Indah Sari, S.H., Juan Febrianto, S.H., Alan Effain, S.T., semoga persahabatan kita tidak pernah berujung.
10. Teman-teman di PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) Unhas.
11. Mace' dan para sahabat di kolong.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, Penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Semoga karya ini bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Makassar, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
A. Kriminologi	9
1. Pengertian Kriminologi.....	9
2. Ruang Lingkup Kriminologi	13
B. Pengertian Delik dan Unsur - unsurnya.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	20
C. <i>Illegal Fishing</i>	24
1. Pengertian <i>Illegal Fishing</i>	24
2. Jenis-jenis <i>Illegal Fishing</i>	29
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	37
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	45
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Data.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data.....	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 49
A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Illegal Fishing</i> di Kota Makassar	49
B. Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> yang Dilakukan Direktorat polair Polda Sulselbar	57
 BAB V PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km² dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan (Burke et al, 2002 dalam Zainarlan, 2007).

Kekayaan sumber daya hayati perairan Indonesia yang tinggi akan sangat bermanfaat jika dilakukan pemanfaatan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan ini dapat dilakukan melalui proses penangkapan yang bertanggung jawab. Dalam melakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*

yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktik penangkapan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian.

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *illegal fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap *trawl*. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang.

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional untuk memanfaatkan ikan-ikan karang banyak yang digolongkan ke dalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah yang karang.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional di dalam memanfaatkan sumber daya perikanan khususnya didalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan,

juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.

Selain penggunaan bahan peledak di dalam penangkapan ikan di daerah karang, kegiatan yang marak dilakukan oleh nelayan adalah dengan menggunakan obat bius atau bahan beracun lainnya. Bahan beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti *sodium* atau *potassium sianida*. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan hidup memicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merusak dengan menggunakan racun *sianida*. Kegiatan ini umum dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh ikan hidup.

Kerusakan ini diakibatkan oleh penggunaan bahan beracun pada saat melakukan kegiatan penangkapan. Keadaan ini diperkuat lagi karena sebagian wilayah pulau yang tidak berpenghuni sehingga tidak adanya pengawasan dan memberikan ruang gerak kepada nelayan untuk melakukan penangkapan *illegal fishing* secara leluasa.

Kegiatan lain yang termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang. Kegiatan ini merupakan kegiatan penangkapan yang bersifat merusak dan tidak ramah lingkungan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat

tangkap tersebut termasuk ke dalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk. Dalam penerapan hukum itu sendiri, tindak pidana *illegal fishing* kurang diterapkan di masyarakat. Terbukti dengan banyaknya pelaku yang lolos dengan mudah ataupun dihukum namun dengan pidana yang ringan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga turut andil dalam meningkatnya *illegal fishing* dari hari ke hari.

Dalam konteks hukum Indonesia tindak pidana *illegal fishing* saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas *illegal fishing* dengan usaha parlemen membuat UU perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Di masa mendatang, hendaklah pemerintah mampu memikirkan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah

perairan. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa jika masyarakat dibiarkan mengelola sumber daya alam secara eksploitatif dan destruktif, maka dalam jangka panjang akan sangat merugikan diri sendiri, baik secara ekonomi maupun secara ekologis. Oleh sebab itu, dari sekarang perlu diupayakan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih parah dari perilaku yang hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan sesaat. Bertolak dari hasil pengamatan penulis terhadap tindak pidana *illegal fishing* khususnya di perairan kota Makassar, yang akhir-akhir ini cenderung meningkat, kemudian karena kurangnya pihak-pihak yang mengungkapkan dan membahas sekitar permasalahan *illegal fishing* di wilayah perairan kota Makassar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap *Illegal Fishing* yang Terjadi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010 - 2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar?
2. Upaya apakah yang dilakukan Direktorat Polair Polda Sulselbar dalam menanggulangi terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing*.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Direktorat Polair Polda Sulselbar dalam menanggulangi terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal Fishing*.
2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (peneliti) dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*.
3. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi kedepannya pada kasus tindak pidana *Illegal Fishing*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dari berbagai aspek.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Istilah kriminologi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Paul Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis.

Beberapa ahli terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

Paul Topinard (Topo Santoso, 2003: 9), mengemukakan bahwa: "Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan".

Soedjono Dirjosisworo (1985:24) memberikan definisi kriminologi adalah:

“Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi”.

Edwin H .Sutherland (Alam, A.S, 2010: 1), mengemukakan bahwa:

“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena”

“Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.

J. Constant (Alam, A.S, 2010:2), memberikan gambaran tentang kriminologi:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor- faktor yang menjadi sebab – musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.

WME. Noach (Alam, A.S, 2010: 2), mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab – musabab serta akibat – akibatnya”.

Sedangkan menurut G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma: 1984)

“Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri”.

Demikian pula menurut W.A.Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003: 9) mengemukakan bahwa Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Lebih lanjut menurut W.A.Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003: 9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan
- c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan obyeknya (hal yang diketahui).

Jadi menurut W.A.Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003: 9) bahwa

“Kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain”.

Selanjutnya W.A.Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003: 9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.
2. Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso dan Eve Achjani Zulfa, 2003: 11), mengemukakan bahwa Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kata kriminologi sebagai ilmu yang menyelidiki atau mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan. Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer*). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.

Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah.

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setara bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Topo Santoso (2003: 23), mengemukakan bahwa Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Lanjut dalam Topo Santoso (2003: 12), objek studi Kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang disebut kejahatan

- 1) Kejahatan dari segi yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1978: 1):

“Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum”.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Penjelasan di atas dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989: 110), bahwa:

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.”

Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976: 3) merumuskan kejahatan adalah:

“Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003:14) bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

Lebih lanjut J.E Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut :

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

2) Kejahatan dari segi sosiologis

Menurut Topo Santoso (2003: 15) mengemukakan bahwa secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku

yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13) mengemukakan bahwa Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang undang- undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsurnya.

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang di dalam *Wetboek Van Strafbbaarfeit* Netherland dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut :“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*stratbaarfeit*”. Istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa

Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Menurut Simons (Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.”

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).”

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh

manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit*. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya atautkah sekedar mengalihkan bahasanya.

Suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu “asas legalitas” (*Principle of legality*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Ucapan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach (Moeljatno, 2009: 27), asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Maksud tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang ialah bahwa harus ada aturan undang-undang yaitu aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Kemudian dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) yang pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara.

Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang

dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kata *strafbaar* artinya 'dapat dihukum'. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan (Leden Marpaung, 2006: 10).

Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah "pidana" dengan istilah "hukuman", istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan "*straff*", tetapi menurutnya istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman". Sementara Muladi dan Bardanawawi Arief, istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya

sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni (Adami Chazawi, 2002: 79):

- 1) Dari sudut pandang teoritis
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut undang-undang
Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), di mana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, di mana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

C. *Illegal Fishing*

1. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* (Peter Salim, 2002: 925, 707), dikemukakan bahwa “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*illegal fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (UU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Dengan kata lain *illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut dari kegiatan-kegiatan *illegal fishing* yang dapat merusak keutuhan

ekosistem perairan ada beberapa undang-undang yang mengatur dan telah dituangkan pada pasal-pasal antara lain:

1. Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu:

a) Pasal 67 yang berbunyi: “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

b) Pasal 68 yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

b. Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup; dan;

c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu:

1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

- 2) Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- 5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud di ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah.

Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama di dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*, karena substansi UU ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan perikanan, secara menyeluruh undang-undang ini menjelaskan tentang Wilayah Pengelolaan (BAB III Pasal 6 – BAB IV Pasal 24), Usaha Perikanan (BAB V).

2. Jenis-jenis *Illegal Fishing*

1. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*)

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan peralatan perahu, *compressor*, alat selam, serta bahan-

bahan untuk pembuatan bom (pupuk *ammonium nitrate*, detonator, sumbu api).

Dampak dari penggunaan bom ikan tersebut dengan adanya getaran yang cukup keras yaitu rusak/hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain dan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat kembali kekeadaan semula.

2. Menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*)

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh “punggawa/intelektual *dader*” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut.

Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia *potassium/calium cyanide* (potas) ke dalam lubang-lubang karang, yang terdapat ikan yang sementara memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar oleh cairan *kalium cyanide* tersebut, akan pingsan dan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudian dimasukkan ke dalam wadah/tempat yang berisi air yang tidak mengandung *kalium cyanide*, sehingga dapat segar dan hidup kembali yang selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup.

“Punggawa/intelektual *dader* biasanya memiliki penampungan/penjemput ikan, keramba di tengah laut, di mana nelayan penangkap dapat menjual ikannya secara langsung.

Dengan sasaran ikan yang hidup di terumbu karang yang dapat diekspor keluar negeri maupun yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat seperti ikan sunu dari berbagai jenis. Kegiatan tersebut dapat berdampak pada kerusakan terumbu karang, terganggunya ekosistem perairan, dan musnahnya biota laut lainnya yang mengancam kerusakan permanen sehingga berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian lingkungan perairan/laut di masa yang akan datang.

3. Penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*

Wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa:

Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu:

1. Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;

3. Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
5. Laut Jawa;
6. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
9. Laut Sulawesi, dan Sebelah Selatan Laut Halmahera;
10. Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
11. Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Dengan adanya wilayah-wilayah tersebut maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau *fishing ground*.

Biasanya *fishing ground* yang terdapat di Indonesia memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga banyak kapal-kapal perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh jumlahnya sangat

besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut menjadi *over fishing*.

Dengan terjadinya *over fishing* di wilayah tersebut maka pemerintah mulai mengatur wilayah-wilayah penangkapan, namun dengan banyaknya kapal-kapal perikanan menyebabkan masih adanya kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah penangkapan. Padahal mereka mengetahui bahwa wilayah yang mereka jadikan tempat penangkapan ikan telah mendapatkan peringatan terjadi *overfishing*. Namun para penangkap ikan tetap melakukan usaha penangkapannya di tempat itu, sehingga mereka menyalahi *fishing ground*. Selain itu mereka juga tidak mau berpindah wilayah penangkapan ikan karena ikan-ikan jenis tertentu yang hanya terdapat di wilayah itu dan menjadi target tangkapan mereka.

Kesalahan *fishing ground* inilah yang banyak terjadi di wilayah penangkapan ikan Indonesia, maka pemerintah akan menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran *fishing ground* karena bila tidak maka hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dinikmati oleh rakyatnya dan rakyat hanya akan merasakan kerugian akibat *illegal fishing* ini.

4. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)

Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

2. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi:

Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengelolaan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan, dan pemasaran”.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan *illegal fishing* karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal perikanan yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan guna mendapatkan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal

perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “setiap orang dilarang:

- a) Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan atau
- b) Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.”

Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan.

1. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang

Illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operandi, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia adalah pukat harimau. Dampak dari penggunaan pukat harimau

tersebut secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang

diperoleh dan perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan bahwa:

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

2. Teori Neo Klasik

Menurut Made Darma Weda (1996:15) bahwa:

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo klasik (Made Darma Weda,1996:15) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pelunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas.Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - i. Patologi,ketidakmampuan untuk bertindak,sakit jiwa,atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - ii. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada

residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori – teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut Made Darma Weda (1996:16) bahwa:

Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini (Made Darma Weda 1996:16) bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.”

Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, 2010: 21) berpendapat bahwa:

“Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.”

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso (Made Darma Weda 1996:16-17) bahwa:

Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation* (*Le lois de l'imitation*).

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring (Made Darma Weda, 1996:18) menarik kesimpulan bahwa “Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (Made Darma Weda, 1996:19) bahwa:

“Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial.”

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.

Teori ini menafsirkan kejahatan (Made Darma Weda, 1996:19) sebagai:

Fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa

kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab

Perancis. Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20):

“Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.”

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

7. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut Made Darma Weda, (1996:20) bahwa:

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelegensi, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan

kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa rumus teori ini adalah:

$$N + K1 = K2$$

Keterangan:

N = Niat

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk

mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi yang namanya kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya saja, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura dan Australia dan yang lainnya. Jadi intinya dalam upaya Pre-Emtif faktor niat tidak terjadi.

b. Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya Preventif, upaya yang dilakukan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang

yang ingin melakukan pencurian kendaraan tetapi kesempatan itu dihilangkan karena kendaraan yang ada ditempatkan di tempat penitipan kendaraan yang aman, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya Preventif intinya adalah bagaimana menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan dari awal.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap *Illegal Fishing* yang Terjadi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010 - 2013)”, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Kota Makassar, tepatnya di Direktorat Polair Polda Sulselbar sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

1. Data primer, yakni data kasus yang diperoleh langsung oleh Peneliti di Direktorat Polair Polda Sulselbar
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yaitu: Pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku artikel, laporan penelitian maupun materi kuliah yang diperoleh serta sumber bacaan lain yang relevan dengan masalah *illegal fishing*.
2. *Interview* (wawancara) yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penulisan ini.

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah secara kualitatif kemudian dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar

Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) adalah unsur pelaksana staf khusus Polisi yang dibawah naungan kapolda, bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi kepolisian resort.

Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (SUBBAGRENMIN), yang bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program kerja dan latihan serta pembinaan administrasi umum porsenil logistik serta urusan dalam lingkungan Direktorat Polair Polda Sulselbar.
2. Sub Direktorat Pembinaan Operasi (SUBDITBINOPS), yang bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional yang meliputi kegiatan dan pencarian wilayah laut/perairan dan pembinaan masyarakat pantai termasuk kerjasama lintas sektoral dalam rangka pencarian di laut/perairan.

3. Sub Direktorat Fasilitas (SUBDIFASHARKAN), yang bertugas menyiapkan fasilitas dan dukungan logistik, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi dan elektronik kapal.
4. Kapal, yang bertugas melaksanakan patroli laut/perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang operasional kepolisian serta bantuan pencarian, penyelamatan kecelakaan di laut/perairan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khususnya di Direktorat Polair Polda Sulselbar senantiasa berusaha mewujudkan visinya, yaitu mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif, sedangkan represif adalah sebagai langkah terakhir. Polri berusaha menjalankan misinya, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, melanjutkan upaya koordinasi internal Polri, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karenanya aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum kota Makassar selalu melakukan usaha-usaha penindakan dalam menanggulangi hal-hal yang berpotensi dapat mengganggu kamtibmas.

Fakta telah menunjukkan bahwa kejahatan *illegal fishing* sudah menjadi sesuatu yang sangat memperihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan yang memiliki mata pencaharian di wilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup dalam biota laut.

Sebelum penulis kemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di Kota Makassar berikut penulis paparkan hasil penelitian jumlah tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu 2010-2013 melalui tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Temuan Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara
Illegal (*Illegal Fishing*) Tahun 2010-2013

No	Jenis Tindak Pidana	Tgl	TKP	Modus	Langgar Pasal	Barang Bukti	Tersangka	Posisi Kasus	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menangkap ikan tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan/atau berlayar tanpa surat izin berlayar (SIB)	Hari Kamis Tanggal 29 Juli 2010 sekitar jam 09.00 wita	Perairan Makassar dengan posisi 04°51'632 S - 118°. 50.882 T	Melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan/atau berlayar tanpa surat izin berlayar (SIB)	Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 98 UU No. 31 tentang Perikanan	1 (satu) unit KM JABAL SUR 1 (satu) buah Jaring/ Rengge	Lk. H. MAKMUR Bin H. COLLE	P. 21 SERAH TAHAP II JPU	TUNTAS
2	Menangkap ikan tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan/atau berlayar tanpa surat izin berlayar (SIB)	Hari Kamis Tanggal 29 Juli 2010 sekitar jam 09.00 wita	Perairan Makassar dengan posisi 04°57'711 S - 118°. 52.576 T	Melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan/atau berlayar tanpa surat izin berlayar	Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 98 UU No. 31 tentang Perikanan	1 (satu) unit KM BUNGA MAWAR 1 (satu) buah Jaring/ Rengge	Lk. H. AHMAD Bin H. CONGKENG	P. 21 SERAH TAHAP II JPU	TUNTAS
3	Penyalah-gunaan bahan peledak	Hari Senin, Tanggal 14 Juni 2011 Pukul 14.00 wita	Perairan Makassar	Menangkap ikan mengguna- kan handak	Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHP/ Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	1 (satu) unit perahu Jolloro 1 (satu) unit kompresor peralatan selam 1 (satu) rol selang 1 (satu) botol amonium nitrat campur solar 1 (satu) potong sumbu api	Lk. SAID Bin MAKKAH	BER- KAS LENG- KAP	TUNTAS
4	Penyalah-gunaan bahan peledak	Hari Kamis, 20 Oktober 2011	Perairan Makassar	Menangkap ikan mengguna- kan bahan kimia/	Pasal 83A ayat (1) Sub. Pasal 85 UU No. 45	1 (satu) unit perahu Jolloro Samanta	Lk. GAMAL Bin SUDDING	SERAH THP II	TUNTAS

				potasium sianida yang dicampur dengan air laut yang disemprotkan ke karang tempat persembunyian ikan	Tahun 2009 tentang Perikanan	3 (tiga) butir biji potasium 1 (satu) ekor ikan			
5	Membawa ikan tanpa dilengkapi dengan SPB dan SIKPI Nomor: Lp/42/I/2012/ Dit Polair Murai - 663	Sabtu, 31 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wita	Perairan Makassar pada posisi 04°06'00" LS - 119° 22 00" BT	KLM BERKAT HIDAYAH yang berlayar membawa ikan tanpa dilengkapi dengan SPB dan SIKPI	Pasal 94 Jo. Pasal 28 ayat (1) dan 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	1 (satu) unit KLM BERKAT HIDAYAH 1 (satu) bendel dokumen kapal 18 (delapan belas) boks/ kotak berisi ikan	Lk. MUH. ILYAS, umur 38 tahun, pek. Nelayan/ Nahkoda KLM BERKAT HIDAYAH	TAHAP II	TUNTAS
4	Mengangkut ikan yang tidak sesuai dengan wilayah izin trayek dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Nomor: Lp/65/IV/ 2013/Pol 5011. 19-04-2013	Jumat, 19 April 2013, sekitar jam 02.00 wita	Perairan Selat Makassar pada posisi 27°30" S – 117 46' 20" T	Mengangkut ikan yang tidak sesuai dengan wilayah izin trayek yang terlampir dalam SIKPI dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.	Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 135 jo Pasal 310 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Pasal 62 tentang Perkapalan	1 (satu) buah KMN JABAL NOOR 05 1 (satu) bendel dokumen kapal	Lk. RUSLI, umur 40 tahun. Pek. Pelaut, Almt. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk, Kota Banjarmasin Prov. Kaltim	TAHAP I	
5	Menangkap Kapal yang diduga menggunakan surat-surat palsu Nomor: LP/05/V/ 2013/Pol – 50, 12	Selasa, 21 Mei 2013 sekitar jam 23.00 wita	Perairan Makassar Prov. Sulsel pada posisi 05°07'30" L - 119°. 21 30" T	Diduga terjadi pemalsuan surat-surat kapal	Pasal 263 jo 55, 56 KUHP dan Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	1 (satu) unit PM BERKAT SAHABAT 1 (satu) bendel dokumen kapal	Lk. SULKIPLI, umur 28 tahun. Pek. Nelayan. Almt. Pulau Balo Baloang, Kec. Pangkep, Prov. Sulsel	SP3	

Sumber Data: Ditpolair Polda Sulselbar

Berdasarkan tabel di atas, dapat dirincikan jumlah kasus *illegal fishing* berdasarkan jenisnya di Kota Makassar sebagai berikut.

Tabel 2
Jumlah Temuan Kasus Penangkapan Ikan secara Ilegal
(*Illegal Fishing*) di Kota Makassar Tahun 2010-2013

No	Jenis <i>Illegal Fishing</i>	Jumlah Kasus per Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Menggunakan bahan peledak/bom ikan (<i>bomb fishing</i>)	-	2	-	-
2	Menggunakan zat kimia/bius ikan (<i>cyanide fishing</i>)	-	-	-	-
3	Penangkapan ikan dengan melanggar <i>fishing ground</i>	-	-	-	-
4	Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)	2	-	1	2
Jumlah		2	2	1	2

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa selama kurun waktu antara tahun 2010 – 2013 ditemukan 7 kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Pada tahun 2010 terdapat 2 kasus *illegal fishing* yang keduanya merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI) dan tidak terdapat kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*), menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*), dan juga penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*. Tahun 2011 terdapat 2 kasus *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*), tahun 2012 terjadi penurunan yaitu hanya terdapat 1 kasus *illegal fishing* dan tahun 2013 terdapat 2 kasus *illegal fishing* yang masing-masing merupakan penangkapan ikan tanpa

memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 kasus yang berkaitan dengan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI) dan 2 kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*).

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dengan pelaku tindak pidana *illegal fishing*, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Said bin Makkah. Jenis *Illegal Fishing*: menggunakan bahan peledak.

Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana *illegal fishing* didasarkan faktor ekonomi. Pelaku tidak memiliki sumber penghasilan selain dari hasil melautnya, sedangkan keluarganya memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, demi kelangsungan hidup dan keluarganya pelaku tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan bahan peledak. Kepada peneliti, pelaku mengatakan bahwa pelaku tidak pernah merasa bersalah melakukan *illegal fishing*.

2. Sulkipli, umur 28 tahun. Pekerjaan Nelayan. Jenis *illegal fishing*: pemalsuan surat-surat kapal.

Pelaku mengatakan bahwa dia melakukan tindak pidana *illegal fishing* karena kesulitan memperoleh surat izin sedangkan

pelaku harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pelaku tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan uang secara instan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Kota Makassar sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan/pemberontakan. Demikian pula *illegal fishing*, alasan pokok yang dikemukakan oleh pelaku adalah karena faktor ekonomi. Pelaku mengaku bahwa mereka melakukan *illegal fishing* karena tidak memiliki pekerjaan atau karena hidup mereka bergantung pada hasil penangkapan ikan mereka, sedangkan keluarga mereka memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu melakukan *illegal fishing* menjadi alternatif mereka untuk kelangsungan hidup mereka.

Kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu membuat tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah sehingga mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang perekonomian individu agar bisa hidup layak.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Kasat Polair Polres Pelabuhan KOMBES POL H.Hari sanyoto,AMKA (wawancara tanggal 25 September 2013) bahwa adanya kasus *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polair Polda sulselbar dikarenakan tingkat kesejahteraan

nelayan yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara instan meskipun melanggar ketertiban dan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

2. Faktor Pengetahuan

Selain faktor ekonomi, maka faktor rendahnya pengetahuan nelayan juga mendorong terjadinya *illegal fishing*. Nelayan cenderung tidak mengetahui larangan *illegal fishing* terutama penggunaan bahan peledak. Nelayan kurang mengetahui dampak penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Patroli AKBP Takbir (wawancara tanggal 25 September 2013) bahwa nampak ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya *illegal fishing* yakni salah satunya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang larangan penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak terhadap kehidupan biota laut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terjerumus menggunakan bahan peledak untuk meningkatkan hasil tangkapannya.

Kurangnya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan menyebabkan banyak di antara masyarakat nelayan tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak termasuk dampak yang lebih jauh terhadap lingkungan laut. Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius maka hal ini dapat

menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi generasi yang akan datang, diantaranya matinya flora dan fauna laut bersama habitatnya.

3. Faktor Pendidikan

Faktor lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam bertindak dan berperilaku cenderung berpikir dengan menggunakan kerangka pikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung dapat dipertanggungjawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berpikiran sempit.

Menurut SATPOLAIR Polres pelabuhan KOMBES POL H.Hari sanyoto,AMKA (wawancara tanggal 25September 2013), para pelaku yang tertangkap umumnya hanya memiliki pendidikan setingkat SD ataupun tidak bersekolah. Sehingga disimpulkan pelaku *illegal fishing* memiliki pendidikan yang tergolong rendah.

B. Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* yang Dilakukan Direktorat Polair Polda Sulselbar

Masalah tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polair Polda Sulselbar dalam kurun waktu 2010-2013 jika dilihat dari segi jumlahnya masih terbilang sedikit. Meskipun demikian, tetap diperlukan penyelesaian terhadap permasalahan ini.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat polair polda sulselbar seperti yang dikemukakan oleh SATPOLAIR Polres Pelabuhan KOMBES POL H.Hari sanyoto,AMK,A sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing* di Kota Makassar. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polair Polda Sulselbar dapat diminimalisir. Upaya preventif yang dilakukan antara lain:

- a. Penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa, atau secara langsung mengadakan seminar ataupun hanya sekadar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya *illegal fishing* baik bagi pelaku maupun masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat

agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi *illegal fishing*.

- b. Mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus-menerus di bawah koordinasi kepolisian.
- c. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik *illegal fishing*.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing*, sampai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim.

Menurut Kanit Patroli AKBP Takbir (wawancara tanggal 25 September 2013), tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*, yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Dalam penanganan kasus *illegal fishing* diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku *illegal fishing*. Berdasar dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nation Convention on*

The Law of The Sea 1982), pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai aturan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodir masalah *illegal fishing* serta dapat mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan.

Dalam hal ini menurut SATPOLAIR Polres Pelabuhan KOMBES POL H.Hari sanyoto,AMKA (wawancara tanggal 25 September 2013) mengutamakan untuk menerapkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena berlakunya undang-undang ini maka berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan semakin tegas dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, memidanakan pelaku *illegal fishing*. Diharapkan pula dengan penggunaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *illegal fishing* serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tindak pidana *illegal fishing* dapat diberantas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di kota Makassar adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*.
2. Upaya penanggulangan *illegal fishing* yang dilakukan Direktorat Polair Polda Sulselbar meliputi:
 - a. Upaya preventif
 - i) Mengadakan penyuluhan hukum
 - ii) Mengadakan patroli secara rutin
 - iii) Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
 - b. Upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

B. Saran

1. Disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana *illegal fishing*.
2. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umumnya.
3. Dalam hal pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia.
 - b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional
 - c. Perlu adanya operasi pengamanan secara rutin, terpadu, terkoordinasi dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu dibentuk tim gabungan instansi-instansi terkait.
4. Dalam pembuatan peraturan oleh *legislatif* dan pihak regulator lainnya hendaknya mempertimbangkan kinerja pelaksana peraturan di lapangan sehingga peraturan tersebut tidak hanya bagus dalam tataran konsep namun dapat menjadi hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana* 1. Sinar Grafika: Jakarta.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. IKAPI: Makassar.
- Chazawi, Adami. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta Rajawali Pers: Jakarta.
- Dahuri, Rokhmin. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Fauzi, Akhmad. 2007. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Idris, Zakariah. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI: Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W. 1982. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- Prijanto, Heru, 2007. *Hukum Luat Internasional*. Bayu Media: Malang
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1996. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. PT Pradnya Paramita: Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni: Jakarta.
- Purnianti, dkk. 1994. *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Rayhan, A. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Citra Wacana: Jakarta.

Sianturi, 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, AHM-PTHM: Jakarta

Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press: Malang.

Tresna, R. 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. Tiara: Jakarta.

Utrecht. 1994. *Hukum Pidana 1*. Pustaka Tintas Mas: Surabaya.

Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang –Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir